

**EFEK PSIKOLOGIS KEBIJAKAN PENGHAPUSBUKUAN DAN
RESCHEDULING TUNGGAKAN KREDIT PADA ANGGOTA
KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)
(STUDI KASUS DI P2KP-PNPM MANDIRI DESA GEMPOL
KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN PASURUAN)**

Mas Drajat

Abstrak

Realita di awal tahun 2001 setelah program P2KP-PNPM Mandiri dilaksanakan untuk menanggulangi kemiskinan maka di dalamnya terdapat perguliran modal usaha untuk masyarakat miskin, tetapi setelah beberapa tahun sejalan dengan itu banyak muncul tunggakan kredit di kelompok swadaya masyarakat akibatnya program ini tidak berjalan optimal, untuk mengatasi hambatan ini pemerintah mengeluarkan kebijakan penghapusbukuan dan rescheduling tunggakan kredit pada anggota kelompok swadaya masyarakat (KSM).

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat kasuistik adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan induktif, penelitian ini dilakukan di P2KP-PNPM Mandiri Desa Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive random sampling dengan mengikuti prinsip snowball, pengumpulan data menggunakan metode dokumenter, wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Pemeriksaan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik triangulasi metode sedangkan analisis data dilakukan melalui tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi adapun teknik analisis yang digunakan adalah content analysis dan analisis tematik.

Temuan di lapangan menjelaskan bahwa kebijakan penghapusbukuan dan rescheduling tunggakan kredit telah menimbulkan efek psikologis pada anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Hal ini dikarenakan rata-rata anggota KSM adalah masyarakat miskin yang kondisi ekonominya tidak menentu. Jangka tunggakan kredit yang telah lama tidak dilunasi juga dapat disebabkan karena berbagai faktor termasuk kepribadian individu, kultur budaya, sosial, agama, dan lain sebagainya. Faktor-faktor di atas telah menjadikan beranekaragamnya efek psikologis yang timbul di kalangan anggota KSM yang dapat dilihat dari sudut pandang dimensi kognitif (persepsi individu, opini individu, dan kesadaran individu), dimensi afektif (perasaan individu, emosional individu, dan motivasi individu) dan dimensi konasi (sikap, ekspresi, perilaku individu, dinamika interaksi sosial individu, dan pola komunikasi individu).

Efek psikologis kebijakan penghapusbukuan tunggakan kredit dilihat dari dimensi kognitif; aspek persepsi individu adalah karena uang hibah maka mereka beranggapan meskipun tidak dikembalikan tidak ada permasalahan, aspek opini individu adalah kecenderungan setuju dan sependapat, aspek kesadaran individu adalah kedisiplinan, tanggung jawab rendah bahkan muncul demoralisasi. Dimensi afeksi: aspek perasaan individu adalah kecenderungan merasa senang, aspek emotional individu adalah kecenderungan emosi tidak terkendali, berlebih meskipun mereka tahu akan tanggung jawab, aspek motivasi individu adalah pengalaman hidup, semangat menata hidup kembali ke depannya karena tidak terbebani. Dimensi konasi: aspek sikap, ekspresi dan perilaku individu adalah kecenderungan pasrah dan tidak mau berusaha, dan kompromi, aspek dinamika

interaksi sosial individu adalah kurang bersosialisasi dengan masyarakat, individualistik dan pemalu, aspek pola komunikasi individu adalah kecenderungan defence terhadap masalah.

Efek psikologis kebijakan rescheduling tunggakan kredit dilihat dari dimensi kognitif: aspek persepsi individu adalah kecenderungan menjadi beban di kemudian hari, aspek opini individu adalah kecenderungan tidak setuju dan tidak sependapat, aspek kesadaran individu adalah kedisiplinan, tanggung jawab rendah. Dimensi afeksi: aspek perasaan individu adalah kecenderungan merasa tidak senang, aspek emotional individu adalah kecenderungan merasa tertekan dan resah bahkan merasa pura-pura lupa terhadap tunggakan kredit yang mereka miliki, aspek motivasi individu adalah keinginan untuk mengembalikan meskipun terpaksa. Dimensi konasi: aspek sikap, ekspresi, dan perilaku individu adalah kecenderungan meremehkan, enggan mengebalikan, terbebani, tertekan, dan tidak ada keyakinan akan dapat bertanggung jawab, aspek dinamika interaksi sosial individu adalah kurang bersosialisasi dengan masyarakat, individualistik, aspek pola komunikasi individu adalah kecenderungan tertutup dan mempertahankan egonya sendiri.

1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan yang dibuat oleh masyarakat perlu disusun dalam suatu program-program yang berdasarkan kebutuhan riil dari masyarakat. Pelaksanaan pembangunan tingkat desa atau kelurahan yang selama ini dilakukan, terbukti tidak serius dalam memberdayakan dan memandirikan masyarakat. Selama ini masyarakat hanya dijadikan objek dari sebuah pelaksanaan pembangunan yang datang dari atas. Upaya penyadaranpun tidak dilakukan sehingga masyarakat menjadi pragmatis bahkan muncul persepsi negatif tentang pembangunan, sebagai sisa dari semua ini adalah rusaknya mental masyarakat.

Sudah menjadi komitmen kita bersama untuk tidak mengulangi kegagalan program pembangunan sebelumnya maka kehadiran P2KP-PNPM Mandiri diharapkan menggugah kesadaran baru di masyarakat, yang memandang bahwa pembangunan adalah demi kesejahteraan masyarakat, untuk itu diperlukan kerjasama yang baik antara semua pihak utamanya dalam penanggulangan kemiskinan. P2KP-PNPM Mandiri sendiri merupakan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan institusi lokal yang tangguh sebagai syarat menuju pembangunan yang berkelanjutan. Perencanaan pembangunan yang partisipatif selalu diawali dari bawah

dari kebutuhan riil masyarakat, lalu disusun perencanaan yang melibatkan semua lapisan masyarakat termasuk dari masyarakat miskin bahkan pemerintah daerah. Dalam proyek penanggulangan kemiskinan di perkotaan, masyarakat diharapkan untuk mampu melaksanakan sebuah metode perencanaan partisipatif yang meliputi pemberdayaan di bidang fisik, bidang sosial dan bidang ekonomi (perguliran) tetapi sejalan dengan prosesnya yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi (perguliran modal) banyak ditemui kendala yang mempengaruhi pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan-Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (P2KP-PNPM Mandiri) secara menyeluruh sehingga dikhawatirkan dapat menggagalkan dan menghambat program yang telah berjalan ini. Kendala itu antara lain banyaknya tunggakan kredit anggota KSM di P2KP-PNPM Mandiri. Hal ini dimaklumi karena sasaran anggota KSM di P2KP-PNPM Mandiri merupakan masyarakat miskin sehingga dilihat dari segi apapun mereka masih lemah. Oleh karena itu program ini mencoba untuk mengurangi bagaimana dampaknya terhadap program ini dengan mencoba untuk mengatasi hal itu dengan menerapkan kebijakan penghapusbukuan dan *recheduling* tunggakan kredit seperti

halnya pada lembaga keuangan lain yang memiliki permasalahan yang sama.

Hal ini sejalan terhadap aturan yang dikeluarkan pemerintah berupa Surat Menteri Keuangan No. 5-363/MK.017/1998, tanggal 23 Juni 1998 tentang penghapusbukuan dan *rescheduling* tunggakan kredit terhadap segala lembaga keuangan baik itu milik pemerintah, koperasi maupun swasta dengan syarat-syarat yang telah ditentukan di dalamnya maupun tujuannya. Soedrajat Djiwandono (dalam Suyatno, 2002:56) menjelaskan pengertian penghapusbukuan dan *rescheduling* kredit macet sebagai berikut:

1. Penghapusbukuan:
 - a. Secara administrasi yang tidak menghilangkan hak tagih.
 - b. Secara administrasi yang dianggap sebagai kerugian dan tidak dapat ditagih lagi.
2. *Rescheduling*:
Penjadwalan ulang terhadap kredit macet dengan melakukan perubahan syarat perjanjian kredit atau jangka waktu kredit, termasuk masa tenggang baik perubahan besarnya angsuran maupun tidak.

Indrawan Ismawan (dalam Suyatno, 2002:113) dua motif dikeluarkannya kebijakan penghapusbukuan dan *rescheduling* tunggakan kredit:

- a. Memberi kompensasi kepada anggota KSM.
- b. Perangsang bagi anggota KSM untuk bisa lebih baik berkaitan dengan kredit.

Tetapi setelah itu tidak hanya berhenti disitu permasalahannya, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pasti memiliki dua efek alternatif yaitu efek positif dan negatif. Hal ini oleh peneliti dicoba untuk meneliti bagaimana kebijakan penghapusbukuan dan *rescheduling* tunggakan kredit dapat menimbulkan efek psikologis pada anggota KSM baik itu anggota KSM yang

menunggak maupun yang tidak menunggak. Adapun alasan peneliti mencoba untuk melakukan penelitian di atas adalah karena selama ini penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa pihak hanya melihat dimensi administrasinya saja padahal di lapangan banyak ditemukan dimensi-dimensi lain yang muncul setelah kebijakan ini dilakukan salah satunya adalah dimensi psikologis. Oleh karena itu peneliti mencoba untuk melihat dimensi psikologis yang bisa ditimbulkan akibat adanya kebijakan penghapusbukuan dan *rescheduling* pada anggota KSM. Dimensi psikologis yang muncul meliputi aspek kognitif yang meliputi bagaimana persepsi, opini/pendapat, dan kesadaran anggota KSM dalam menanggapi kebijakan penghapusbukuan dan *rescheduling* serta aspek konasi yang meliputi sejauh mana sikap, ekspresi, perilaku, dinamika interaksi sosial individu dan pola komunikasi anggota KSM dalam menanggapi kebijakan penghapusbukuan dan *rescheduling*.

Adapun teori yang mendukung berkaitan dengan masalah psikologis yang hendak diteliti diatas adalah dari: *Hasan (dalam Sumadi, 2006:77) menguraikan konsep reaksi psikologis mencakup tiga dimensi:*

- a. Dimensi Kognitif: mencakup kesadaran tentang masalah, kesadaran tentang sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi masalah, pengetahuan tentang sumber daya dan perasaan percaya diri dalam mendapatkan pelayanan yang diperlukan.
- b. Dimensi Afeksi: mencakup bagaimana seseorang meluapkan segala perasaan dan emosinya dalam menghadapi masalah yang ada pada diri individu bersangkutan.
- c. Dimensi Konasi: mencakup kemampuan berkomunikasi, dinamika

interaksi sosial dan pola perilaku klien dan hasil peranan klien.

Mann (dalam Sumadi, 2006:83) menyatakan bahwa konsep psikologis meliputi:

1. Komponen kognisi berisi persepsi, kepercayaan, dan stereotip yang dimiliki individu mengenai sesuatu, atau dengan kata lain disamakan dengan pandangan/opini.
2. Komponen afektif merupakan perasaan individu terhadap objek dan menyangkut masalah emosi, aspek emosional ini yang biasanya berakar paling dalam yang merupakan aspek yang paling bertahan dalam individu.
3. Komponen konasi merupakan tendensi atau kecenderungan untuk bertindak atau bereaksi terhadap sesuatu dengan cara tertentu.

Adapun ketiga dimensi ini sangat dipengaruhi oleh struktur sosial, status deskriptif seperti jenis kelamin, kelompok etnis, umur, keturunan, dan status yang diperoleh seperti pekerjaan, pendidikan dan kelas sosial mempengaruhi tingkat pemahaman dan perilaku seseorang sedangkan kultur dan struktur politik mempengaruhi dimensi institusional.

Dimensi kognitif, berhubungan dengan gejala mengenal pikiran. Ini berarti berwujud pengolahan, pengalaman dan keyakinan serta harapan-harapan individu tentang objek tertentu. Neisser (1967) mengartikan kognisi sebagai proses yang mengubah, mereduksi, memperinci, menyimpan, mengungkapkan dan memakai setiap masukan yang datang dari alat indera.

Dimensi kognitif ini merupakan komponen dari suatu sikap yang berisi ide, anggapan-anggapan, pengetahuan, keyakinan dari orang yang bersangkutan mengenai objek sikap, yang sangat menentukan dalam kognisi ini adalah anggapan-anggapan evaluatif terhadap objek sikap yang melibatkan penilaian

kualitas baik atau buruk, diinginkan atau tidak diinginkannya suatu objek sikap.

Dimensi konasi, perilaku dianggap sebagai suatu tindakan manusia yang dapat diamati, perilaku merupakan faktor yang membentuk sikap seseorang yang terbentuk dari kognisi dan afeksi dalam diri seseorang perilaku adalah predisposisi atau kesiapan orang yang bersangkutan untuk bertindak dalam menghadapi objek sikap. Apabila orang memiliki kognisi yang positif dan perasaan yang positif terhadap objek tertentu maka ia akan cenderung *mendekati* (membantu, mendukung dan semacamnya) objek tersebut. Sebaliknya bila ia memiliki kognisi yang negatif pula maka ia akan cenderung untuk *menjauhi*, (merusak atau menentang objek sikapnya).

Sehingga nantinya peneliti bisa menjelaskan efek yang ditimbulkan akibat kebijakan penghapusbukuan dan *rescheduling* dari dimensi yang lain tidak hanya dimensi administrasi termasuk dalam hal ini dimensi psikologisnya sehingga nantinya hasil yang diperoleh dapat bermanfaat bagi keilmuan psikologi pada khususnya dan keilmuan yang lain pada umumnya terutama nantinya bisa dijadikan literatur bagi pengambil kebijakan penghapusbukuan dan *rescheduling* dalam hal ini lembaga-lembaga keuangan termasuk oleh pemerintah sendiri.

Dalam prosesnya berkaitan dengan program-program P2KP-PNPM Mandiri dibentuk lembaga yang dinamakan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang mana dapat dijelaskan sebagai lembaga otonom dan independent yang dibentuk oleh utusan masyarakat dengan tujuan utama untuk melakukan pemberdayaan masyarakat khususnya masalah kemiskinan serta menumbuhkan kembali ikatan dan solidaritas sosial antar warga agar saling bekerja sama demi kebaikan bersama yang berazaskan Pancasila dan UUD 1945 serta menjunjung nilai-nilai

dapat dipercaya, ikhlas/kerelawanan, kejujuran, keadilan, kesetaraan, dan kebersamaan dalam keberagaman dengan prinsip demokrasi, transparansi dan akuntabilitas, partisipatif, dan desentralisasi.

1. Kajian Pustaka

Carl Fried (dalam Sofyan, 1986:46) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Mosher (dalam Soekartawi, 1996:97) menyatakan bahwa usaha tani adalah sebagai tempat atau bagian dari permukaan bumi dimana pertanian diselenggarakan oleh seseorang petani tertentu apakah dia pemilik, penggarap, ataupun manager yang digaji. Usaha tani adalah himpunan dari sumber-sumber alam yang terdapat di tempat itu yang diperlukan untuk memproduksi pertanian, seperti tumbuhan, tanah, air, perbaikan-perbaikan yang dilakukan atas tanah itu, sinar matahari, bangunan-bangunan yang didirikan diatas tanah itu dan sebagainya.

Mubyarto (1983:28) menyatakan bahwa kredit adalah: "Sebuah transaksi antara dua pihak di mana pertama disebut kreditor yang mampu menyediakan sumber-sumber ekonomi berupa barang, jasa, atau uang dengan janji bahwa pihak kedua atau debitur akan membayar kembali pada waktu yang telah ditentukan."

Eric (dalam Soekartawi, 1996:63) menyatakan bahwa petani adalah penduduk yang secara eksistensial terlibat dalam cocok tanam dan membuat keputusan yang

otonom tentang proses cocok tanam, kategori ini dengan demikian mencakup penggarapan atau penerima bagi hasil maupun pemilik-penggarap selama mereka ini berada pada posisi pembuat keputusan yang relevan tentang bagaimana pertumbuhan tanaman mereka, namun itu tidak memasukkan nelayan atau buruh tani tidak bertanah.

Muchdarsyah (1993:24) menyatakan bahwa penghapusbukuan adalah penghapusan secara administrasi tetapi tidak menghilangkan hak tagih serta dianggap sebagai kerugian dan tidak dapat ditagih lagi.

Surat Edaran BI No. 23/12/BPP menyatakan bahwa *rescheduling* adalah melakukan syarat-syarat perjanjian kredit atau jangka waktu kredit, termasuk masa tenggang baik termasuk perubahan besarnya angsuran maupun tidak.

Peter Salim (dalam Arief, 1998:37) menyatakan bahwa reaksibilitas adalah aksesibilitas yaitu hal yang dapat dimasuki, hal mudah dicapai dan hal mudah didapat sedangkan dalam kamus ilmu sosial *accessibility* diartikan sebagai kemudahan para anggota sebuah kategori sosial dapat saling berhubungan. Dengan demikian reaksibilitas dapat diartikan hal yang dapat dimasuki yang mudah dicapai dan yang bisa didapat kembali dari anggota masyarakat.

Kredit Usaha Tani adalah kredit modal kerja yang diberikan oleh bank pemberi kredit kepada koperasi primer baik sebagai pelaksana pemberi kredit maupun panyalur kredit untuk keperluan petani yang tergabung dalam kelompok petani guna membiayai usaha taninya dalam rangka intersifikasi padi, palawija, dan hortikultura.

Petani Penunggak adalah Petani peserta KUT yang belum dapat melunasi atau membayar KUT sampai pada waktu jatuh tempo yang telah ditetapkan (berlaku pada pelaksanaan KUT pola umum).

Kelompok Tani Penunggak KUT adalah kelompok tani peserta KUT yang belum dapat melunasi atau membayar KUT sampai pada waktu jatuh tempo yang telah ditetapkan (berlaku dalam pelaksanaan KUT pola khusus).

Reaksibilitas Penunggak KUT dalam memperoleh KUT adalah kesempatan kembali yang dapat diperoleh petani atau kelompok tani yang menunggak KUT untuk memperoleh Kredit Usaha Tani kembali.

Temuan di lapangan menggambarkan bahwa penghapusbukuan tunggakan kredit memberikan dampak yang sangat besar terhadap reaksiabilitas petani atau kelompok tani sedangkan *rescheduling* tunggakan kredit memberikan dampak yang sedang terhadap reaksiabilitas petani atau kelompok tani.

Manfaat langsung penghapusbukuan tunggakan kredit lebih dirasakan oleh petani atau kelompok tani penunggak itu sendiri. Dampak positif penghapusbukuan tunggakan kredit memberikan kesempatan bagi petani atau kelompok tani lainnya dalam mengakses kredit kembali sedangkan dampak negatif penghapusbukuan tunggakan kredit bisa mempersepsikannya dapat memunculkan sikap enggan dalam pengembalian kredit, merusak moralitas petani atau kelompok tani sendiri, dan hilangnya rasa tanggung jawab.

Manfaat langsung *rescheduling* tunggakan kredit adalah penunggak

mendapat keringanan perpanjangan waktu pengembalian kredit. Dampak positif *rescheduling* tunggakan kredit adalah petani atau kelompok tani penunggak dapat mengakses kredit kembali, dampak negatif petani atau kelompok tani hilang tanggungjawab karena kurang kedisiplinan petani atau kelompok tani dalam pengembalian kredit.

Soedrajat Djiwandono (dalam Suyatno, 2002:56) menjelaskan pengertian penghapusbukuan kredit macet dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: Pertama, penghapusbukuan secara administrasi yang tidak menghilangkan hak tagih bank. Kedua, penghapusbukuan yang dianggap sebagai kerugian dan tidak dapat ditagih lagi.

Dalam hal penghapusbukuan secara administrasi kredit yang dihapuskan tetap dicatat secara ekstrakompatabel dan biasanya debitor tidak diberitahu bahwa kreditnya telah dihapusbukuan, sedangkan penghapusbukuan yang dianggap sebagai kerugian, bank penghapusbukuan hak tagihnya kepada debitor dengan memberitahukan penghapusan utang tersebut.

Penghapusbukuan dalam beberapa peraturan yang terkait tidak didefinisikan dengan jelas, begitu pula dalam UU Perbankan No 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan dalam pasal 37 ayat 1 huruf c juncto penjelasannya tidak mendefinisikan secara jelas apa yang dimaksud dengan penghapusbukuan. Dalam penjelasannya hanya dijelaskan bahwa penghapusbukuan kredit adalah sebagai salah satu langkah alternatif yang perlu dilakukan Bank Indonesia terhadap Bank yang mengalami

kesulitan dan membahayakan kelangsungan usahanya.

Dengan demikian pengertian penghapusbukuan tunggakan kredit dapat dijawab secara teknis sesuai dengan kelaziman dunia perbankan, yaitu dengan menggabungkan dua pengertian seperti yang dijelaskan oleh Soedrajat Djiwandono di atas. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan penghapusbukuan tunggakan kredit mencakup kedua pengertian penghapusbukuan yaitu penghapusbukuan dan penghapustagihan tunggakan kredit untuk MT 2001 sampai dengan MT 2003. Bank menghapusbukukan secara administrasi dan menghilangkan hak tagihnya terhadap debitor (penunggak).

Penghapusbukuan tunggakan kredit adalah penghapusbukuan secara administrasi dengan memindahkan catatan tunggakan kredit dari neraca ke catatan secara ekstrakompatabel dan penghapustagihan tunggakan kredit. Debitor tetap menjalankan kewajibannya berupa pengembalian kredit sebaliknya bank tetap berhak terhadap kewajiban debitornya tetapi tidak berhak untuk menagih tunggakan kredit kepada debitor. Penghapusbukuan tunggakan kredit sebagai upaya alternatif menyehatkan kondisi bank yang bersangkutan sekaligus merupakan langkah terakhir yang harus dilakukan agar tidak mengganggu perencanaan kredit untuk masa mendatang karena jumlah sisa kredit yang macet akan meperkecil ruang gerak dari *loanable funds* (dana-dana yang dipinjamkan) dengan penghapusbukuan tunggakan kredit diharapkan dapat mendukung program ini secara keseluruhan.

Rescheduling adalah penjadwalan ulang terhadap kredit macet dengan melakukan perubahan

syarat perjanjian kredit atau jangka waktu kredit, termasuk masa tenggang baik perubahan besarnya angsuran maupun tidak.

Dalam UU Perbankan No. 10 tahun 1998, telah dijelaskan secara baku dalam pasal 1 butir 11, bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pengertian kredit di atas, kredit dapat diartikan sebagai penyediaan uang yang diberikan kepada peminjam berdasarkan persetujuan yang berlaku dengan memberikan pinjaman dimana peminjam mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya dalam waktu tertentu.

Iyan Muchtar (dalam Solichin, 2004:82) menyatakan bahwa banyaknya tunggakan akibat kurangnya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kredit itu sendiri. Berkaitan dengan permasalahan tunggakan kredit maka pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa surat Menteri Keuangan Nomor : 55-363/MK.017/1998 tanggal 23 Juni 1998 tentang persyaratan dan penghapusbukuan tunggakan kredit dan rescheduling tunggakan kredit.

Hasan (dalam Sumadi, 2006:77) menguraikan konsep reaksi psikologis mencakup tiga dimensi:

- a. Dimensi Kognitif: mencakup kesadaran tentang masalah, kesadaran tentang sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi masalah, pengetahuan tentang sumber daya dan perasaan

- percaya diri dalam menepatkan pelayanan yang diperlukan.
- b. Dimensi afeksi: mencakup bagaimana seseorang meluapkan segala perasaan dan emosinya dalam menghadapi masalah yang ada pada diri individu bersangkutan.
 - c. Dimensi Konasi: mencakup kemampuan berkomunikasi, dinamika interaksi sosial dan pola perilaku klien dan hasil peranan klien.

Dimensi Kognitif

Cutlip dan center (dalam Alex, 2003:59) menyatakan bahwa opini adalah ekspresi tentang sikap mengenai masalah yang bersifat kontroversial yang menimbulkan pendapat berbeda-beda. Mengutip *von wiebe, cutlip* dan *center* antara sikap dan opini atau sebaliknya terdapat suatu kerjasama yang berkesinambungan dalam diri manusia dalam menghadapi masalah atau situasi tertentu.

Pada dasarnya sikap yang mendahului opini adalah hasil dari rangsangan luar yang telah diolah manusia dalam dirinya sesuai dengan hasil pendidikan, pengalaman, dan perasaannya. Dengan demikian pendapat umum merupakan hasil dari sikap sekumpulan orang yaitu sikap yang memperlihatkan reaksi yang sama terhadap rangsangan luar yang sama.

Rudolph F. Verderber (dalam Alex, 2003:41) *menyatakan bahwa persepsi adalah proses menafsirkan informasi indrawi.*

Menurut teori *rangsangan-tanggapan (stimulus-respon/SR)*, persepsi merupakan bagian dari keseluruhan proses yang menghasilkan tanggapan setelah rangsangan diterapkan pada manusia.

Persepsi dan kognisi diperlukan dalam semua kegiatan psikologis bahkan diperlukan, bagi orang yang paling sedikit terpengaruh atau sadar akan adanya rangsangan menerima dan dengan suatu cara menahan dampak dari rangsangan. Rangsangan – Persepsi - Pengenalan (Penalaran / Perasaan) - Tanggapan. Persepsi, Pengenalan, Penalaran dan Perasaan disebut variabel psikologis yang muncul diantar rangsangan dan tanggapan, adapula cara lain untuk mengkonsepsikan lapangan psikologi namun rumus S-R dikemukakan disini karena telah diterima secara luas oleh para psikolog dan karena unsur-unsur dasarnya mudah dipahami dan digunakan oleh ilmu sosial lainnya.

Dari segi psikologi dikatakan bahwa tingkah laku seseorang merupakan fungsi dari cara dia memandang. Oleh karena itu untuk mengubah tingkah laku seseorang harus dimulai dari mengubah persepsinya dalam proses persepsi terdapat tiga komponen utama berikut.

- a. Seleksi adalah proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit.
- b. Interpretasi yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian dan kecerdasan. Interpretasi juga bergantung pada kemampuan seseorang untuk mengadakan pengategorian informasi yang diterimanya yaitu proses mereduksi informasi yang kompleks menjadi sederhana.
- c. Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai

reaksi. Jadi proses persepsi adalah melakukan seleksi, interpretasi, dan pembulatan terhadap informasi yang sampai.

Neisser (dalam Singgih, 2000:37) menyatakan bahwa kesadaran adalah keadaan yang berhubungan dengan gejala pikiran yang masih terjaga untuk tetap bisa melakukan pengolahan, perubahan, pereduksian dan pengkomounikasian setiap masukan stimulus yang datang dari alat indera.

Adapun perkembangan dari kesadaran ini akan mengarah pada anggapan-anggapan evaluatif terhadap objek yang terdiri dari penilaian kualitas, baik buruk, diinginkan atau tidak diinginkannya suatu objek.

Dimensi Konasi

Gibson (dalam Alex, 2003:78) menyatakan bahwa sikap merupakan kecenderungan untuk bertindak atau bereaksi terhadap rangsang, manifestasi sikap tidak dapat langsung dilihat, tetapi harus ditafsirkan terlebih dahulu sebagai tingkah laku yang masih tertutup.

Ciri-ciri sikap:

1. *utilitarian function*, bahwa sikap memungkinkan untuk memperoleh atau memaksimalkan reward atau persetujuan dan meminimalkan hukuman.
2. *knowledge function*, sikap membantu memahami lingkungan.
3. *value-expression function*, sikap terkadang mengkomunikasikan nilai dan identitas yang dimiliki seseorang terhadap orang lain.
4. *ego defensive function*, sikap melindungi diri, menutupi kesalahan, agresi untuk mempertahankan diri.

Teori-teori pembentukan dan perubahan sikap:

1. Teori belajar dan penguatan: sikap merupakan respon yang dipelajari terhadap stimulus tertentu.

Pembentukan sikap bisa menggunakan:

- a. *Prosedur Classical Conditioning* (sikap adalah ekuivalen dengan suatu respon bersyarat, yakni sesuatu yang dapat ditimbulkan dengan mengenalkan suatu rangsang tertentu)
- b. Proses reward dan punishment (bahwa faktor utama yang mempengaruhi perolehan dan pemeliharaan atas sikap sikap tertentu berhubungan dengan tingkat dimana sikap secara verbal maupun non verbal dilakukan oleh orang lain).

2. *Teori konsistensi kognitif*: menjelaskan bagaimana komponen-komponen sikap sesuai antara satu dengan lainnya. Teori ini mengandung manusia sebagai pemroses informasi yang aktif yang mencoba memahami seluruhnya atas apa yang mereka rasakan, pikirkan, dan berbuat, dimana mereka secara aktif menyusun dan menafsirkan dunia tersebut untuk membuat kecocokan terhadap inkonsistensi yang bisa terjadi diantara dan dalam sikap-sikap.

Teori ini meliputi:

- a. Teori keseimbangan heider: sikap kita berkenaan dengan orang-orang dan objek sikap yang konsisten.
- b. Teori disonansi kognitif: jika seseorang mempunyai dua kognisi (ide-ide dan pikiran-

pikiran) secara stimulan dan saling berkontradiksi maka orang tersebut akan mengalami disonansi kognitif. Disonansi menghasilkan ketegangan psikologis yang mendorong seseorang mengurangi disonansi tersebut dengan cara: mengubah elemen tingkah laku, mengubah elemen kognitif lingkungan, menambah elemen kognitif baru.

Dimensi Afeksi

Teori-teori Emosi:

1. Berdasarkan hubungan emosi dengan gejala kejasmanian
 - a. Teori James-Lange
Emosi merupakan akibat atau hasil persepsi keadaan jasmani (*felt emotion is the perception of bodily states*) orang sedih karena menangis, orang takut karena gemetar dan sebagainya, dengan demikian dapat dikemukakan bahwa gejala kejasmanian merupakan sebab emosi dan emosi merupakan akibat dari gejala kejasmanian.
 - b. Teori Cannon-Bard
Emosi bergantung pada aktivitas dari otak bagian bawah atau aktivitas sentral atau pendekatan neurologis.
 - c. Teori Schachter-Singer
Emosi merupakan hasil interpretasi dari *aroused* atau *stirred up* dari keadaan jasmani. Pada umumnya sama untuk sebagian terbesar dari emosi yang dialami dan apabila ada perbedaan fisiologis dalam pola otonomik pada umumnya orang tidak dapat mempersepsi hal ini.
2. Berdasarkan hubungan antar emosi
Robert Plutchik (Morgan, dkk., 1984) teori mengenai deskripsi emosi yang berkaitan dengan emosi primer dan hubungannya satu dengan lain. Menurut Plutchik emosi itu berbeda dalam tiga dimensi, yaitu intensitas, kesamaan, dan polaritas atau pertentangan. Intensitas, similiaritas dan polaritas merupakan dimensi yang digunakan untuk mengadakan hubungan emosi yang satu dengan lainnya.
3. Berdasarkan hubungan motivasi
Menurut Leeper (dalam Morgan, dkk., 1984) garis pemisah antara emosi dengan motivasi adalah sangat tipis. Misal takut adalah emosi tetapi ini juga motif pendorong perilaku karena bila orang takut maka orang akan terdorong berperilaku ke arah tujuan tertentu. Menurut Tomkins (lih. Morgan, dkk., 1984) emosi menimbulkan energi untuk motivasi, motif atau dorongan hanya memberikan informasi mengenai sementara kebutuhan.
4. Berdasarkan hubungan kognitif
Menurut Ricard Lazarus: emosi menekankan pada penafsiran atau pengertian mengenai informasi yang datang dari beberapa sumber. Penafsiran ini mengandung cognition atau memproses informasi dari luar dan dari dalam (jasmani dan ingatan) jadi emosi merupakan hasil penafsiran atau evaluasi mengenai informasi yang datang dari situasi lingkungan dan dari dalam, hasil dari penafsiran yang

kompleks dari informasi tersebut adalah emosi yang dialami itu.

5. Berdasar hubungan ekspresi muka Menurut Darwin (dalam Carlson, 1987) kaitan emosi dengan ekspresi muka hal ini dapat diamati dengan jelas bagaimana seseorang yang marah akan terlihat pula bagaimana roman mukanya, latar belakang kebudayaan yang berbeda menggunakan pola yang sama dalam gerak dari facial muscles untuk menyatakan keadaan emosional seseorang oleh karena itu ekspresi roman muka adalah bersifat universal dan oleh karenanya merupakan hal yang inherited atau bawaan.

3. Hasil Penelitian dan Diskusi Hasil Penelitian

Setelah data disajikan (dideskripsikan) selanjutnya data itu dianalisis dan dibahas untuk dijadikan hasil dari penelitian. Analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengacu pada hasil data wawancara dengan kerangka teori yang telah dipakai sebelumnya, dan didasarkan pada fokus judul efek psikologis kebijakan penghapusbukuan dan *rescheduling* tunggakan kredit pada anggota kelompok swadaya masyarakat (KSM) di P2KP-PNPM Mandiri Desa Gempol, dengan melihat dari sudut pandang dimensi kognitif, dimensi afektif, dan dimensi konasi.

Efek psikologis Kebijakan Penghapusbukuan tunggakan kredit pada anggota kelompok swadaya masyarakat (KSM) di P2KP-PNPM Mandiri Desa Gempol, yang pelaksanaan kebijakan penghapusbukuan tunggakan kredit tidak diberitahukan KSM lain selain KSM yang menunggak yang telah

dihapusbukukan, sedangkan kriteria yang dipakai untuk kebijkana penghapusbukuan adalah KSM yang menunggak dibawah atau tepat tahun 2003, tidak ada kemampuan untuk mengembalikan lagi (kondisi ekonomi), dan tidak ada kejelasan keberadaan anggota KSM.

a. Dimensi Kognitif

Dengan adanya kebijakan penghapusbukuan tunggakan kredit, anggota kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang dihapusbukukan cenderung setuju dan sependapat bahkan banyak yang berterima kasih dan bersyukur karena alasan ketidakmampuan secara ekonomi, anggota banyak yang meninggal dan tidak tinggal di desa ini sehingga anggota KSM yang lain tidak akan terbebani lagi, selain itu persepsi anggota KSM bahwa uang modal pinjaman ini merupakan uang hibah dari pemerintah jadi meskipun tidak dikembalikan tidak masalah hal ini seperti yang dikatkaan oleh beberapa pihak yang terkait dengan program P2KP-PNPM Mandiri bahwa persepsi masyarakat seperti itu dapat memunculkan tingkat kesadaran yang rendah akan tanggung jawab, kedisiplinan bahkan dikhawatirkan memunculkan demoralisasi di kalangan anggota kelompok swadaya masyarakat (KSM).

Kognitif	Kesimpulan	Ket
1. Persepsi Individu	Bahwa uang modal pinjaman merupakan uang hibah maka mereka beranggapan	Rat a-rata

	meskipun tidak dikembalikan tidak masalah.	
2. Opini/Pendapat individu	Cenderung setuju dan sependapat dengan kebijakan penghapusbukuan.	Rata-rata
3. Kesadaran individu	Kesadaran rendah akan tanggung jawab, kurang kedisiplinan dan demoralisasi di kalangan anggota KSM	Rata-rata

b. Dimensi Afeksi

Dengan adanya kebijakan penghapusbukuan tunggakan kredit, anggota kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang dihapusbukukan cenderung merasa sangat senang dan bersyukur selain karena alasan ekonomi juga karena ketidakjelasan anggota di masing-masing kelompok swadaya masyarakat (KSM) sehingga dapat mengurangi beban hidup bahkan secara emosional mereka berjanji tidak akan utang lagi jika benar-benar tidak mampu untuk mengembalikan selain itu mereka cenderung menjadikan ini sebagai pengalaman untuk tidak utang yang berkaitan dengan prosedur tanggung renteng.

Afeksi	Kesimpulan	Ket.
1.	Kecenderungan	Rata

Perasaan Individu	menyatakan merasa senang dan bersyukur	-rata
2. Emotional Individu	Kecenderungan emotional tidak terkontrol meskipun mereka mengerti akan tanggung jawab	Rata-rata
3. Motivasi Individu	Dijadikan sebagai pengalaman hidup terhadap kehati-hatian akan hutang, semangat menata hidup kembali kedepannya karena tidak terbebani lagi akan tunggakan kredit.	Rata-rata

c. Dimensi Konasi

Konasi	Kesimpulan	Ket.
1. Sikap, ekspresi, dan perilaku individu	Sikap cenderung pasrah dan tidak mau berusaha... senang karena tidak punya beban, tidak takut dan tegang lagi... cenderung mau kerja sama dan kompromi.	Rata-rata

2. Dinamika interaksi sosial individu	Kurang bersosialisasi dengan masyarakat, cenderung individu, cenderung pemalu tetapi memiliki empati yang tinggi.	Rata-rata
3. Pola komunikasi individu	Lebih cenderung <i>defence</i> terhadap masalah serta berbicara apa adanya bahkan lebih penurut.	Rata-rata

Efek psikologis kebijakan *rescheduling* tunggakan kredit pada anggota kelompok swadaya masyarakat (KSM) di P2KP-PNPM Mandiri Desa Gempol.

a. Dimensi Kognitif

Dengan adanya kebijakan *rescheduling* tunggakan kredit, anggota kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang *di-rescheduling* cenderung tidak setuju dan tidak sependapat karena keadaan ekonomi yang pasang surut kalau pun ada yang setuju itu pun tidak yakin bisa mengembalikannya kembali selain itu ada persepsi dari anggota KSM yang menunggak mengatakan bahwa tunggakan kredit pada semua anggota KSM ini tidak akan pernah selesai sebelum permasalahan penyelewengan dana oleh salah

satu anggota tidak diselesaikan terlebih dahulu (*persepsi*) hal ini juga yang memunculkan tingkat kesadaran yang rendah akan tanggung jawab dan kedisiplinan pengembalian kredit (kesadaran) dikalangan anggota kelompok swadaya masyarakat (KSM).

Kognitif	Kesimpulan	Keterangan
1. Persepsi Individu	Bahwa kebijakan <i>rescheduling</i> ini akan menjadi beban bagi mereka dikemudian hari	Rata-rata
2. Opini/pendapat individu	Kedenderungan tidak setuju dan tidak sependapat karena berbagai macam faktor.	Rata-rata
3. Kesadaran Individu	Tingkat kesadaran rendah akan tanggung jawab dan kedisiplinan akan pengembalian kredit di kalangan anggota KSM	Rata-rata

b. Dimensi Afektif

Dengan adanya kebijakan *rescheduling* tunggakan kredit, anggota kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang *di-rescheduling* cenderung merasa tidak begitu senang (*perasaan*) karena bisa menjadi beban lagi disaat keadaan perekonomian saat ini yang pasang surut dan tidak begitu yakin untuk dapat mengembalikan bahkan secara emosional mereka resah dan tertekan yang mana akan menjadi beban yang harus menjadi tanggung jawab lagi yang sebelumnya mereka sudah tidak memikirkan bahkan lupa dengan tunggakan kredit itu (*emosional*) tetapi masih ada sebuah kemauan dari masing-masing anggota kelompok swadaya masyarakat (KSM) untuk berusaha melunasi kembali serta berusaha membantu petugas untuk menagih keanggota lainnya (*motivasi*) sehingga permasalahan tunggakan kredit di masing-masing kelompoknya dapat teratasi dan terselesaikan.

Afeksi	Kesimpulan	Keterangan
1. Perasaan Individu	Kecenderungan merasa tidak senang karena akan menjadi beban hidup.	Rata-rata
2. Emotional individu	Merasa tertekan dan resah bahkan mereka tidak pernah memikirka	Rata-rata

	n akan tunggakan kredit yang mereka miliki.	
3. Motivasi Individu	Ada keinginan untuk mengembalikan dan berusaha melunasi apa yang menjadi tanggung jawab mereka tetapi dengan waktu yang belum ada kepastina.	Rata-rata

c. Dimensi Konasi

Konasi	Kesimpulan	Keterangan
1. Sikap, ekspresi, dan perilaku individu	Sikap enggan mengembalikan, meremehkan, dan merasa terbebani... tertekan, tidak begitu senang dan tidak yakin ... tidak kesadaran akan tanggung jawab kurang.	Rata-rata
2. Dina	Sangat kurang bekerja	Rata-rata

mika interaksi sosial individu	sama, kurang bermasyarakat, dan mementingkan diri sendiri.	
3. Pola komunikasi individu	Lebih cenderung tertutup, berhati-hati dalam berbicara, dan ikut kemauannya sendiri.	Rata-rata

5. Simpulan

Kebijakan penghapusbukuan dan *rescheduling* tunggakan kredit di P2KP-PNPM Mandiri Desa Gempol telah menimbulkan efek psikologi pada anggota kelompok swadaya masyarakat (KSM) hal ini dapat dikarenakan rata-rata anggota dari KSM adalah masyarakat miskin yang mana kondisi ekonomi yang tidak menentu, jangka tunggakan kredit yang sudah lama juga dapat disebabkan karena berbagai faktor termasuk disini kepribadian individu, kultur budaya, sosial, agama dan lain sebagainya. Faktor-faktor di atas telah menjadikan beranekaragam efek psikologis yang timbul di kalangan anggota KSM.

Ketiga dimensi ini sangat dipengaruhi oleh struktur sosial, status deskriptif seperti jenis kelamin kelompok etnis, umur, keturunan, dan status yang diperoleh seperti pekerjaan, pendidikan dan kelas sosial mempengaruhi tingkat pemahaman dan perilaku seseorang sedangkan kultur dan struktur politik mempengaruhi dimensi institusional. Dimensi kognitif, berhubungan

dengan gejala mengenal pikiran. Ini berarti berwujud pengolahan, pengalaman dan keyakinan serta harapan-harapan individu tentang objek tertentu.

6. Saran

1. Perlunya perencanaan dan survey sebelum penyaluran kredit, memberikan prosedur pinjaman kredit yang jelas serta menerapkan sanksi yang ada dalam prosedur pinjaman kredit dengan tegas agar tidak terulang kembali terjadinya tunggakan kredit.
2. Perlunya memaksimalkan kinerja BKM dengan personil yang ada, yaitu dengan memberikan pelatihan yang disesuaikan dengan bidang masing-masing dan menindaklanjuti secara nyata kebijakan penghapusbukuan dan *rescheduling* tunggakan kredit dengan langsung turun ke masing-masing KSM untuk memberikan penyadaran untuk mengembalikan pinjaman yang macet.
3. Perlunya ditingkatkan intensitas monitoring dan evaluasi kegiatan P2KP-PNPM Mandiri di Desa Gempol, khususnya pengawasan oleh tim teknis, faskel maupun masyarakat, dengan membuat jadwal monitoring yang dilaksanakan oleh pihak terkait termasuk pemerintah daerah, kemudian hasil dari monitoring dan evaluasi disampaikan kepada BKM, sehingga akan diketahui pada aspek mana kekurangan yang perlu diperbaiki sehingga dapat menghindari terjadinya kemacetan kredit dan penyelewengan kembali dana oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

4. Perlunya terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan salah satu anggota KSM dan selaku manager UPK lama yang melakukan penyelewengan dana sebelum menyelesaikan permasalahan tunggakan kredit pada KSM.
5. Perlunya pemerintah lebih cermat dan teliti dalam mengambil keputusan kebijakan publik yang berkaitan dengan kredit dalam program-program pemerintah sehingga nantinya efek yang ditimbulkan dapat diminimalisir agar program-program pemerintah itu tetap dapat berkelanjutan.

7. Daftar Pustaka

- Buku Pedoman Umum (BPU) P2KP-PNPM Mandiri, 2005. *Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan*. Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- Burhan, Bungin. 2006. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Burhan, Bungin. 2006. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Dirgagunarsa, Singgih. 2000. *Pengantar Psikologi*. Jakarta : Mutiara Sumber Widya.
- Gerungan, W.A., 2001. *Psikologi Sosial*. Bandung : PT. Eresco.
- <http://www.P2KP-PNPM Mandiri.org>. 21 Juli 2009.
- Islamy, Irfan, 2004. *Prinsip-Prinsip Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J, 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Pedoman Teknis P2KP-PNPM Mandiri, Oktober 2005. *Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan*. Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- Porwandari, Kristi. 2001. *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta: LPSP3 UI.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Rakhmat, Jalaludin. 2004. *Psikologi Komunikasi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Sobur, Alex, 2003. *Psikologi Umum*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Suryabrata, Sumadi. 2006. *Psikologi Kepribadian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Suyatno, T., 2002. *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wahab, Solichin Abdul, 2004. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yusuf, Yusmar. 2001. *Psikologi Antar Budaya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.